

LAMPIRAN

1. Kompas.com

KOMPAS.com
Jurnal Berita Nasional Indonesia

Search

REGISTER | LOGIN

NEWS EKONOMI BOLA TEKNO SAINS ENTERTAINMENT OTOMOTIF LIFESTYLE PROPERTI TRAVEL EDUKASI KOLOM

IMAGES TV VIK

Sahabat Wanita Inspirasi Keluarga
nova.id

Home / News / Regional

Protes Angkutan "Online", Sudah 3 Hari Sopir Angkot di Malang Mogok

KONTRIBUTOR MALANG, ANDI HARTIK
Foto: Andi Hartik / KOMPAS.com



Sejumlah penumpang yang tertinggal akibat mogoknya sopir angkot di Kota Malang saat berangkat melalui bus mini. Polres Malang Kota, Rabu (8/3/2017). (KOMPAS.com / Andi Hartik)

Tahukah kamu kenapa Panda jalannya unik?



MALANG, KOMPAS.com - Sudah tiga hari **sopir angkot** di Kota Malang mogok beroperasi. Mereka merasa belum puas dengan keputusan Pemerintah Kota Malang terkait dengan tuntutannya terhadap angkutan **online** yang mulai banyak beroperasi di Kota Malang.

"Kami ingin sikap yang jelas dari pemerintah," kata Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang Ipung Purwono kepada **Kompas.com**, Rabu (8/3/2017).

Pada Selasa (7/3/2017) kemarin, Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memastikan bahwa semua angkutan **online** yang ada di Malang tidak memiliki izin operasional.

Pemerintah berjanji akan melakukan penertiban terhadap angkutan **online** di Kota Malang yang tidak memiliki izin operasional. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memastikan bahwa semua angkutan **online** yang ada di Malang tidak memiliki izin operasional.

Praktis, semua angkutan **online** di Kota Malang akan diterbitkan. Namun, janji pemerintah untuk melakukan penertiban itu belum memuaskan para sopir angkot.

Mereka tetap mogok beroperasi dan meminta ada peraturan yang mengikat terkait keputusan pemerintah yang ingin menertibkan angkutan **online**.

"Kami sudah ada komunikasi. Tapi keputusannya jelas. Kami maunya ada produk hukum, ada Perwal (Peraturan Wali Kota)," katanya.

Dia menyebutkan, pihaknya tidak akan memiliki landasan hukum yang kuat jika keputusan untuk menertibkan angkutan **online** itu tidak dituangkan dalam aturan yang mengikat.

"Hanya kesepakatan belum kuat mas. Kami ingin ada pegangan," ucapnya.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang, Hadi Susanto, mengatakan, satu-satunya langkah untuk menghentikan gejala sopir angkot adalah tanda tangan dari Wali Kota Malang M Anton terkait kesepakatan penertiban angkutan **online**.

"Wali Kota. Tanda tangan Wali Kota," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Kusnadi mengaku tidak mengerti dengan keinginan para sopir angkot itu. Sebab dirinya merasa sudah mengeluarkan keputusan yang menguntungkan mereka.

"Makanya saya tidak tahu permintaan mereka itu apa. Saya tidak tahu mereka maunya apa. Kok masih mogok," tuturnya.

Sementara itu, sejumlah relawan dan petugas dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, anggota Polres Malang Kota dan anggota Kodim 0833 Kota Malang masih setia mengangkut penumpang yang terlantar. Tidak terhitung jumlah kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut penumpang itu.

Setiap kendaraan yang disediakan memiliki jalur tersendiri seperti jalur trayek angkot. Bahkan, mobil berplat merah milik Pemerintah Kota Malang ikut diturunkan mengangkut para penumpang tersebut.



HIDUP DARI NGE BLOG



TERPOPULER

- 1 Dipecat PDI-P, Anggota DPRD NTT Akan Polisikan Megawati Soekarnoputri
Dibaca 31.145 kali
- 2 Rizal Ramli: Terima Kasih Jokowi Telah Memecat Saya...
Dibaca 14.979 kali
- 3 Tarian Erotis di Batam, Polisi Periksa Penari dan Panitia Acara
Dibaca 9.096 kali
- 4 Dalang Andalan dan Anaknya Pun Tewas di Sanggar Seni Tempatnya Mengabdi
Dibaca 7.813 kali
- 5 Deddy-Dedi Unggul di Survei LSI, Ini Tanggapan Ridwan Kamil
Dibaca 6.835 kali



MITRA USAHA
Punya Produk Bagus Tapi Gak Laku-laku?

NOW TRENDING



Ini Cara Pelaku Bobol Kartu Kredit Bermadankan Data Nasabah Curian



Ketum PPP Sengaja Ungkap Upaya Jokowi Tawari Prabowo Jadi Cawapres



Oposisi Tuduh PM Inggris Serang Suriah karena Diperintahkan Trump



DPR Khawatir Data

Penulis : Kontributor Malang, Andi Hartik
Editor : Caroline Damank

TAG: angkutan online sopir angkot

REKOMENDASI UNTUK ANDA

Powered by JIXIE

Temukan inspirasi seputar rumah dengan **IDEA** 360-180, lebih mudah dan cepat



IDEA 360-180

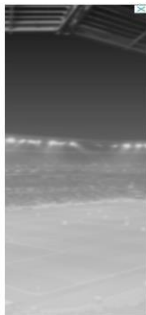
Home / News / Regional

Sopir Angkot dan Ojek "Online" di Bogor Saling Serang

KONTRIBUTOR BOGOR, RAMDHAN TRIYADI BEMPAH
Kompas.com - 20/03/2017, 20:44 WIB



Pengeroyokan. (Tribunnews.com)



BOGOR, KOMPAS.com - Keributan antara para sopir angkutan perkotaan (angkot) dengan pengemudi ojek *online* yang beroperasi di wilayah Bogor berimbas pada aksi saling serang antarkedua kelompok, Senin (20/3/2017).

Bentrokan tersebut dipicu karena dari masing-masing pihak menjadi korban pengeroyokan. Pantauan *Kompas.com* hingga pukul 19.00 WIB, sejumlah titik di Bogor terjadi "medan tempur" antara pengemudi ojek *online* dengan para sopir angkot.

Baca juga: Ricuh Angkot dan Ojek "Online" di Tangerang, Polisi Amankan 21 Orang

Di persimpangan Mall BTM, bentrokan antara keduanya pecah ketika salah satu pengemudi ojek *online* dikeroyok oleh para sopir angkot ketika hendak menurunkan penumpang di daerah itu.

Salah satu petugas Dinas Lalu Lintas Angkutan dan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor Faizal mengatakan, pemukulan tersebut berimbas terjadinya serangan balik dari para pengemudi ojek *online*.

"Korban yang dipukul terus lapor ke teman-temannya. Kemudian mereka menyerang balik para sopir angkot itu," ucap Faizal, di lokasi.

Kata Faizal, akibat peristiwa itu, satu mobil angkot jadi bulan-bulanan dan rusak parah. Pelaku pemukulan, sambung Faizal, diamankan setelah petugas datang ke lokasi kejadian.

"Sopir angkot yang mukul sudah dibawa polisi. Sempat macet panjang juga di sini pas kejadian," imbuhnya.

Bentrokan tak hanya terjadi di Simpang Mall BTM, Kota Bogor saja. Keributan terparah antara sopir angkot dan ojek *online* terjadi di Jalan Abdullah bin Nuh, Yasmin, Kota Bogor.

Satu orang sopir angkot menjadi korban pengeroyokan oleh pengemudi ojek *online*. Ratusan orang pengemudi ojek *online* terlihat berkumpul di pinggir jalan untuk melakukan *sweeping* terhadap para sopir angkot yang melintas di kawasan tersebut.

Petugas kepolisian dengan dilengkapi senjata berkumpul di lokasi untuk mengamankan situasi pasca-bentrokan itu terjadi.

Baca juga: Polisi Pastikan Tak Ada Korban Tewas Saat Sopir Angkot Bentrok dengan Pengemudi Ojek "Online"

Kepala Polsek Bogor Barat Komisaris Polisi Indraningtyas mengungkapkan, penyerangan itu ditengarai karena mereka saling membela kelompoknya masing-masing.

"Kita masih selidiki ini. Saling membela kelompoknya, jadi mereka saling balas-membalas. Masih kita cari pelakunya siapa," singkatnya.



Punya Aset di Usia Muda Kini Bukan Sekadar Mimpi
Malam itu, Faisal (27) tampak sibuk dengan telepon pintar di genggamannya.

[READ MORE](#)



Penulis : Kontributor Bogor, Ramdhan Triyadi Bempah
Editor : Farid Assifa

TAG: ojek online sopir angkot

Berita Terkait

Polisi Pastikan Tak Ada Korban Tewas Saat Sopir Angkot



TERPOPULER

- 1 Dipecat PDI-P, Anggota DPRD NTT Akan Polisikan Megawati Soekarnoputri
Dibaca 31.145 kali
- 2 Rizal Ramlil: Terima Kasih Jokowi Telah Memecat Saya...
Dibaca 14.979 kali
- 3 Tarian Erotis di Batam, Polisi Periksa Penari dan Panitia Acara
Dibaca 5.055 kali
- 4 Dalang Andalan dari Anaknya Pun Tewas di Sanggar Seni Tempatnya Mengabdikan
Dibaca 7.613 kali
- 5 Deddy-Dedi Unggul di Survei LSI, Ini Tanggapan Ridwan Kamil
Dibaca 6.835 kali



NOW TRENDING



Ketum PPP Sengaja Ungkap Upaya Jokowi Tawari Prabowo Jadi Cawapres



Oposisi Tuduh PM Inggris Serang Suriah Karena Diperintahkan Trump



DPR Khawatir Data Pengguna Facebook Indonesia Dipakai Konsultan

Home / News / Megapolitan

Polisi: Organda dan Ojek "Online" di Tangerang Janji Tak Bentrok Lagi

ANDRI DONNAL PUTERA

Kompas.com - 09/03/2017, 10:43 WIB



Sebuah angkot rusak saat terjadinya bentrok antara kelompok sopir angkot dengan pengojek online di Jalan Raya Sangiang, Kota Tangerang, Rabu (8/3/2017) sore. Keributan dipicu demo dari sopir angkot yang disebut memperlakukan ojek online dengan kasar dengan cara sweeping. (KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA)



TANGERANG, KOMPAS.com - Kapolres Metro Tangerang, Banten, Komisaris Besar Harry Kurniawan menyebutkan, telah tercapai kesepakatan antara Organda Kota Tangerang dan perwakilan ojek *online*, setelah pihaknya memediasi pertemuan dengan kedua pihak itu pada Rabu (8/3/2017) malam.

Mediasi dilakukan setelah pada Rabu pagi hingga sore kedua kubu bentrok. *Bentrokan* berawal dari unjuk rasa sopir *angkot* terhadap ojek *online*.

"Sudah ditandatangani surat pernyataan bersama dari kedua belah pihak yang menyatakan kejadian kemarin merupakan kesalahpahaman," kata Harry kepada *Kompas.com*, Kamis pagi ini.

Dalam surat pernyataan bersama itu, ada dua poin kesepakatan. Pertama, kedua belah pihak menyadari dan mengakui bentrok di antara mereka sebagai kesalahpahaman dan masalah akan diselesaikan secara kekeluargaan, saling memaafkan, dan berjanji tidak mengulangi hal serupa di kemudian hari.

Poin kedua, kedua belah pihak berjanji untuk tetap menjaga suasana kondusif di Kota Tangerang dan tidak main hakim sendiri. Bila masih ada yang melanggar kesepakatan ini, maka siap untuk diproses hukum oleh pihak kepolisian.

Surat pernyataan bersama ditandatangani Ketua Organda Kota Tangerang Eddi Faisal dan pembina GoGrabber Tangerang Raya Ferry Budhi.

Surat pernyataan itu turut diketahui oleh Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Dandim 0506 Tangerang Letkol Inf MI Gogor, dan Harry sendiri.

Dari pantauan *Kompas.com*, sejumlah angkot dan ojek *online* sudah kembali beroperasi sejak tadi pagi. Bedanya, kebanyakan ojek *online* tidak mengenakan atribut khas mereka seperti helm maupun jaket yang bertuliskan nama perusahaan ojek *online*.



VIK VISUAL INTERAKTIF KOMPAS vik.kompas.com

DIPLOMASI PARA GAJAH

Ketika para gajah menyelesaikan konflik antara kaumnya dan manusia

Mereka awalnya hidup damai, hingga akhirnya manusia menginvasi "rumah" para gajah. Konflik rebutan ruang tak terelakkan. Kerugian terus diderita kedua pihak. Kini, dengan sentuhan pelatihan yang diberikan, para gajah bisa berdiplomasi mendamaikan kedua kubu yang bertikai. Jangan ada lagi kekerasan. Simak selengkapnya di vik.kompas.com

KOMPAS KOMPAS.com KOMPAS TV

Iklan

See The Online Furniture Store That Has Retailers Worried

Wayfair.com VISIT SITE

TERPOPULER

1	Sandiaga Uno yang Kini Bungkam Ditanya soal Politik...	Dibaca 30.742 kali
2	Prostitusi di Apartemen Kalibata City, Ada Pelanggan dan PSK Berusia Dini	Dibaca 24.724 kali
3	Polisi: Prostitusi Anak Dilakukan di 5 Tower Apartemen Kalibata City	Dibaca 17.438 kali
4	Penjualan Es Kepal Milo yang Tak Lagi "Manis"....	Dibaca 14.305 kali
5	"Pokoknya Jangan Dibalikin Anaknya, Jadi Silpa	



Home / News / Nasional

Revisi UU LLAJ Dinilai Mendesak untuk Atur "Ojek Online"

IHSANUDDIN

Kompas.com - 25/03/2017, 20:50 WIB



Pengemudi ojek online memprovokasi para sopir taksi yang melakukan aksi demonstrasi di kawasan monas, Jakarta, Selasa (22/3/2016). Para ojek online ini kesal akibat salah satu temannya disweeping dan dipukuli. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES (KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES)



JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro menilai revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangat mendesak dilakukan.

Revisi dibutuhkan untuk mengatur keberadaan [ojek online](#) yang saat ini sudah menjamur di kota-kota besar.

Nizar mengatakan, belakangan sudah tidak bisa dipungkiri bahwa kendaraan roda dua sebagai transportasi umum online merupakan kebutuhan masyarakat.

(Baca: [Polisi: "Hoax" Penyebab Bentrohnya Kembali Angkot dan Ojek "Online" di Bogor](#))

Hanya saja dalam UU LLAJ tidak diatur mengenai kendaraan roda dua tersebut. Akibatnya, dalam peraturan menteri perhubungan nomor 32 tahun 2016 yang mengatur tentang transportasi online, juga tidak mengatur roda dua sebagai transportasi umum.

"Maka dari itu perlu adanya revisi undang-undang LLAJ itu. Dengan adanya revisi UU LLAJ maka kendaraan roda dua atau ojek online memiliki payung hukum yang kuat," ujar Nizar dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/3/2017).

Hal ini disampaikan Nizar menanggapi kondisi di kota Bogor yang terjadi ketegangan antara sopir angkot dan pengendara ojek online.

Politisi Gerindra ini mengapresiasi rencana Bupati Bogor dan Wali Kota Bogor memberlakukan aturan berbentuk perda karena adanya kekosongan payung hukum mengenai ojek online.

(Baca: [Redam Konflik Angkot-Ojek "Online", Ini yang Dilakukan Pemkot dan Pemkab Bogor](#))

"Kalau aturan perda itu kan hanya mengikat di daerah bersangkutan. Perda sendiripun harus berpatokan pada landasan hukum di atasnya seperti undang-undang," ujar Nizar.

Nizar juga khawatir peraturan daerah yang diterbitkan tiap kepala daerah akan bertentangan dengan hasil revisi UU LLAJ di kemudian hari.

"Sebaiknya kemenhub responsif dengan masalah ini. Segera revisi UU LLAJ. Untuk apa juga merevisi Permenhub nomor 32 tahun 2016 kalau pada akhirnya masih tidak payung hukum untuk ojek online," ucap Nizar.



TERPOPULER

1	Saat Jokowi Menunjuk Romahumzumi...	Dibaca 79.692 kali
2	Kandidat Cawapres Prabowo Tersisa AHY dan Sandiaga Uno, Ini Respons Demokrat	Dibaca 44.859 kali
3	Zulkifli Hasan Kecwa Gagal Pertemukan Amien Rais dan Jokowi	Dibaca 38.293 kali
4	Sekjen Gerindra Sebut Nama Cawapres Prabowo Tersisa AHY dan Sandiaga	Dibaca 35.185 kali
5	PDI-P Sebut Ada Dinamika di PBNU Terkait Cawapres Jokowi	Dibaca 32.494 kali



NOW TRENDING

2. Tempo.co

Kamis, 9 Agustus 2018

Cari konten

TEMPO.CO

FOKUS
Di Balik Pertemuan Mendag - AS dan Ancaman Denda WTO Rp 5 Triliun

HOME NASIONAL BISNIS METRO DUNIA BOLA CANTIK TEKNO OTOMOTIF FOTO VIDEO INVESTIGASI INDEKS KOLOM LAINNYA

HOME > METRO > LAYANAN PUBLIK

Protes Angkutan Online, Sebagian Angkot Tangerang Tetap Mogok

Oleh : [Tempo.co](#)
Rabu, 8 Maret 2017 09:11 WIB

0 KOMENTAR

f 0

t 0

... 2



Angkutan Kota. TEMPO/Andry Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagian angkutan di Kota Tangerang tetap menggelar aksi mogok pada Rabu pagi, 8 Maret 2017. Padahal sebelumnya telah ada kesepakatan para sopir angkutan dengan Dinas Perhubungan Kota Tangerang dan Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota bahwa angkot tak akan mogok.

Seperti puluhan sopir angkutan R 07 rute Binong-Malabar. Mereka berkumpul di depan Giant Palem Semi, Karawaci, sejak pagi tadi. "Kami meminta adanya realisasi penanganan masalah angkutan online ini selama tiga hari ke depan. Bila tidak ada realisasinya dari para pemangku kepentingan terkait dengan permasalahan ini, kami akan melakukan aksi lebih dari hari ini pada Jumat mendatang," ucap koordinator lapangan angkutan R 07, Umar.

Puluhan sopir beserta angkutan ini berkumpul di Jalan Imam Bonjol. Mereka akan bergerak ke Kantor Wali Kota Tangerang untuk menyampaikan aspirasi. Mereka menuntut pemerintah memberikan solusi terkait dengan maraknya angkutan online yang mengikis pendapatan mereka. Namun petugas kepolisian berusaha membujuk para sopir ini untuk tidak melanjutkan aksi demo karena telah ada kesepakatan bersama yang diteken di Dinas Perhubungan Kota Tangerang tadi malam. "Intinya, tuntutan para sopir angkutan itu akan dimediasi oleh Pemerintah Kota Tangerang," ujar Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota Ajun Komisaris Besar Ojo Ruslani.

Ruslani menduga, karena kesepakatan itu dilakukan hingga larut malam, ada kemungkinan banyak sopir angkutan yang belum menerima informasi itu. "Karena aksi ini meliputi 29 trayek angkutan di Kota Tangerang," tutur Ruslani.

Ketua Kelompok Kerja Subunit T 03 Rure Poris Plawad-Cadas, Jumroni, yang ikut dalam perundingan tadi malam, mengakui banyak sopir angkutan yang belum mendapat informasi terkait dengan batalnya aksi mogok hari ini. "Sampai pagi ini, informasi batal aksi terus kami sampaikan secara berantai," katanya.

JONIANSYAH HARDJONO

TERPOPULER

1

Prostitusi di Apartemen Kalibata City Libatkan Anak-anak

2

JJ Rizal: Sandiaga Uno Sudah Minta Maaf

3

Prostitusi di Apartemen Kalibata City Pakai Aplikasi BeeTalk

4

Anies Bentuk Tim Pertimbangan Monas, Anggaran Gajinya Rp 461 Juta

5

Kasus Video Luna Maya, Kenapa LSM Asal Solo Ini Terus Mengawasi?



Jokowi Puji AMMDes di Acara GIIAS 2018, Siapa Produsennya?
nasional.tempo.co

BACA

FOKUS



Di Balik Pertemuan Mendag - AS dan Ancaman Denda



AS Jatuhkan Sanksi Ekonomi ke Iran Hari Ini, Rouhani Melunak



Kontroversi Pidato Jokowi Soal Berani Berantem di Depan

109

HOME > METRO > METRO SUDUT

Aksi Mogok Angkot dan Sweeping Ojek Online di Bogor Meluas

 Oleh : [Tempo.co](#)
 Selasa, 21 Maret 2017 13:32 WIB

0 KOMENTAR



0



0



2



Ratusan sopir angkot konvoi memprotes transportasi online. MARIFKA WAHYU HIDAYAT

TEMPO.CO, Jakarta – Ratusan sopir angkutan kota (angkot) di wilayah Kota dan Kabupaten Cibinong melanjutkan aksi mogok massal dengan tidak mengangkut penumpang, Selasa, 21 Maret 2017, sejak pagi hingga siang. Pada hari kedua, aksi mogok massal yang terjadi di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor ini semakin meluas. Di belasan titik lokasi sopir angkutan melakukan aksi sweeping dan penghadangan terhadap pengemudi transportasi online.

"Sejak pagi, sopir angkot mogok beroperasi, bahkan mereka menghentikan sejumlah pengendara motor yang dicurigai sebagai ojek online," kata Rismanto, 34 tahun, warga Sukahati, Cibinong, Selasa, 21 Maret 2017.

Baca: [Protes Sopir Angkot di Bogor Diwarnai Bentrokan dengan Ojek Online](#)

Rismanto mengatakan menjadi salah satu pengemudi sepeda motor yang diberhentikan oleh sopir angkot, karena dicurigai sebagai ojek online dan mencari kesempatan menaikkan penumpang.

"Tadi saya sempat dihentikan karena saya membonceng anak berangkat kerja di Cilodong," ucapnya.

Dia mengatakan, pada saat dirinya dihentikan, sejumlah sopir angkot memeriksa telepon seluler yang digunakannya untuk memastikan pengemudi ojek online atau pengendara biasa. "HP saya dicek karena untuk memastikan apakah terpasang aplikasi ojek online atau tidak," kata Rismanto.

Baca: [Kota Bogor Terapkan Rerouting, Sopir Angkot Pilih Trayek Lama](#)

Di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, aksi sweeping ojek online tersebut terjadi di belasan titik, di antaranya Simpang Jalan Pemda, bawah jalan layang Pasar Cibinong, Citeureup, Cileungsi, dan Terminal Bubulak.

Untuk mengantisipasi adanya aksi sweeping balasan, puluhan petugas dari Kepolisian Polresta Bogor, Polres Bogor, dibantu petugas Brimob Polda Jawa Barat dan TNI berjaga di sejumlah titik yang dianggap rawan karena dijadikan sebagai lokasi aksi mogok angkot.

M. SIDIK PERMANA

Mogok Angkutan Kota

Kota Bogor

PILIHAN EDITOR

by Dabile



TERPOPULER

- 1 Prostitusi di Apartemen Kalibata City Libatkan Anak-anak
- 2 JJ Rizal: Sandiaga Uno Sudah Minta Maaf
- 3 Prostitusi di Apartemen Kalibata City Pakai Aplikasi BeeTalk
- 4 Anies Bentuk Tim Pertimbangan Monas, Anggaran Gajinya Rp 461 Juta
- 5 Kasus Video Luna Maya, Kenapa LSM Asal Solo Ini Terus Mengawasi?

Lika Liku Akuisisi Saham Freeport

IS LUWANGA

SENIN, 4 AGUSTUS 2018

WAKTU: 12.00 - 14.00 WIB

MODERATOR
YANCHIE ARJIAN
Ketua Komite Pengawasan

OPEN REGISTRATION
DINA: 08.00-10.00 WIB
ROBBY: 082127222187

PEMERIKSA
SYAHRI RUMAH ALI
Ketua PTU

PEMERIKSA
BAMBANG LATOY ARYONO
Ketua, Jakarta Utara & Selatan

PEMERIKSA
FALAH HARRY SAMPURNO
Ketua, Kota Baru & Kota Lama

PEMERIKSA
NINA MUDALAT
Ketua, Bandung



Jokowi Puji AMMDes di Acara GIIAS 2018, Siapa Produsennya?

[nasional.tempo.co](#)

BACA

FOKUS



Di Balik Pertemuan Mendag - AS dan Ancaman Denda



AS Jatuhkan Sanksi Ekonomi ke Iran Hari Ini, Rouhani Melunak



Kontroversi Pidato Jokowi Soal Berani Berantem di Depan



Harap Cemas KPU Pendaftaran Capres Dilakukan





Instant Grammar Checker

Try Now

HOME > METRO > LAYANAN PUBLIK

Angkot Mogok, Dishub Tangerang Janji Tertibkan Angkutan Online

Oleh : Tempo.co

Rabu, 8 Maret 2017 12:41 WIB

0 KOMENTAR

f 0

t 0

... 1



Ilustrasi angkutan umum. ANTARA/Irsan Mulyadi

TEMPO.CO, Tangerang - Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Saepul Rohman memastikan akan menertibkan angkutan berbasis online. Dinas Perhubungan akan menggandeng Kepolisian Metropolitan Tangerang Kota dalam penertiban nanti. Langkah ini sebagai respon atas tuntutan Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU) yang meminta angkutan online ditertibkan.

"Kami sudah sepakat akan menertibkan angkutan online yang ngetem, tapi juga angkutan bertrayek yang melanggar aturan misalnya parkir di sembarang tempat. Ini mengganggu lalu-lintas," kata Saepul kepada Tempo, Rabu, 8 Maret 2017.

Saepul mengatakan pihaknya bersama Polrestro Tangerang dihadiri KKSU telah bertemu dan merumuskan solusi untuk membatalakan aksi mogok pengemudi angkot yang sedianya digelar hari ini. "Memang sempat mereka (-angkutan umum berkumpul) karena informasi kesepakatan belum seluruhnya sampai kepada KKSU," ujar Saepul.

Baca: [Rencana Mogok Angkot di Kota Tangerang Batal](#)

Sedianya para sopir angkutan umum ini hendak menyasar kantor wali kota dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangerang di Pusat Pemerintahan di jalan Satria Sudirman dan Kantor Dishub di Jalan Dr. Sitafala.

Berdasarkan pantauan Polrestro Tangerang, sekitar 1.000 pengemudi dengan 678 unit angkutan menggelar unjuk rasa. Mereka dikoordinatori Umar dengan mengusung tuntutan penghapusan angkutan online karena merugikan pendapatan sopir angkot.

Namun massa pendemo diantaranya dari sopir angkot R07 jurusan Binong-Pasar Malabar tertahan di titik kumpul Gerbang Perumahan Palembang atau samping Giant Mall Palembang. Mereka dilarang konvoi menuju kantor wali kota karena telah ada kesepakatan.

Polisi meminta agar massa tidak bergerak ke kantor wali kota. Namun para sopir menyatakan belum menerima informasi hasil kesepakatan tersebut. "Kami minta tiga hari ke depan ada penertiban angkutan online, kalau tidak massa lebih besar kami kerahkan," kata Umar koordinator lapangan R 07 jurusan Binong-Pasar Malabar.

Baca: [Protes Angkutan Online, Sebagian Angkot Tangerang Tetap Mogok](#)

Diantara armada angkot yang semula hendak berdemo itu adalah R07 Binong -Malabar dengan armada 200 angkot, R06 A Bonang- Cikokol dengan 146 angkot, R06 B Legok-Pos dengan 200 angkot, R19 Perum 2- Gading dengan 72 angkot dan R13 Klp Dua- Perumnas 1 dengan 60 angkot.

Kepala Satuan Lalu-Lintas Polres Metro Tangerang Kota Ajun Komisaris Besar Ojo Ruslani menyatakan meskipun secara umum aksi unjukrasa batal, namun pihaknya tetap mengantisipasi dengan menyiagakan 25 angkutan di rute-rute tertentu untuk mengangkut penumpang angkutan umum.

AYU CIPTA

TERPOPULER

- 1 Prostitusi di Apartemen Kalibata City Libatkan Anak-anak
- 2 JJ Rizal: Sandiaga Uno Sudah Minta Maaf
- 3 Prostitusi di Apartemen Kalibata City Pakai Aplikasi BeeTalk
- 4 Anies Bentuk Tim Pertimbangan Monas, Anggaran Gajinya Rp 461 Juta
- 5 Kasus Video Luna Maya, Kenapa LSM Asal Solo Ini Terus Mengawasi?

MERDEKA UNTUK SEMUA

Diskon **Rp 17.000** berlaku untuk semua buku TEMPO

Tempo Publishing @tempopublishing Ferry : 0838 9392 0723

PAJERO SPORT

LIMITED EDITION UNLIMITED SOUND EXPERIENCE

OWN IT NOW!

PAJERO SPORT

FOKUS

Di Balik Pertemuan Mendag - AS dan Ancaman Denda

AS Jatuhkan Sanksi Ekonomi ke Iran Hari Ini, Rouhani Melunak

JOKOWI

Kontroversi Pidato Jokowi Soal Berani Berantem di Depan

GAIKINDO

Harap Cemas KPU Pendaftaran Capres Dilakukan

GAIKINDO

PAMERAN OTOMOTIF



Kisruh Angkutan Online, Mabes Polri Mendukung Revisi Permen

Oleh: Tempo.co

Sabtu, 25 Maret 2017 15:41 WIB

0 KOMENTAR



Aksi demo pengemudi taksi online di depan Istana Negara, Jakarta, 19 September 2016. Menurut mereka peraturan ini dapat membunuh keberadaan moda transportasi online (khususnya roda 4). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia mendukung upaya pemerintah mengatur transportasi online. Kepala Bagian Penerangan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan kepolisian bertugas memberi pelayanan dan pengayoman soal keamanan kepada masyarakat. Tahun ini, kata dia, Polri menetapkan sebagai tahun keselamatan bagi para pengguna lalu lintas.

"Kami melihat transportasi online ini memiliki potensi bergesekan dengan yang konvensional," kata dia dalam Talkshow Akhir Pekan Terhangat Radio Sindotrijaya Network di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Maret 2017.

Baca: [Aplikasi Taksi Online Bisa Diblokir dengan Catatan...](#)

Martin mengatakan kehadiran revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 itu bisa mengatur transportasi online. Menurut dia, pengaturan itu berisi hak dan kewajiban.

Misalnya, hak semua warga adalah hidup yang layak dan mendapat pekerjaan. Namun kewajiban mereka, misalnya, adalah harus memiliki keterampilan dalam mengemudi, merawat kendaraan, administrasi, dan ada aturan cc kendaraan.

Martin mengatakan belakangan ini ada beberapa peristiwa bentrokan antara pihak transportasi online dan transportasi konvensional. Salah satu contoh di Bogor, menurut Martin, pemerintah daerah juga turun tangan untuk meredakan gejolak itu.

"Kami apresiasi ada kemauan pemerintah daerah yang mengatur dan tidak membiarkan gesekan terjadi," ujar Martinus. Dia pun meminta aparat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan kepolisian turun mensosialisasikan. "Kami melihat bahwa potensi-potensi ini harus dideteksi awal," ujarnya lagi.

REZKI ALVIONITASARI

Simak pula: [Soal Ide Mobil Kepresidenan, Apa Kabar Nasib Esemka Kini?](#)

[Angkutan Umum](#)
[Polri](#)
[Kotamadya Jakarta Selatan | DKI Jakarta](#)

TERPOPULER

- 1 Gempa 5,2 SR Guncang Malang, Jawa Timur
- 2 Kata Rommy PPP Soal Inisial M dan Rahasia Langit Cawapres Jokowi
- 3 Bertemu Ulama, Jokowi Klarifikasi Soal Tuduhan Antek Asing
- 4 Sulit Akses, Sebagian Korban Gempa Lombok Berada di Pinggir Jalan
- 5 Dituduh Tak Pro Islam, Jokowi: Yang Menetapkan Hari Santri Siapa?



Jokowi Puji AMMDes di Acara GIIAS 2018, Siapa Produsennya?
nasional.tempo.co

BACA

COVERGIRL
GET \$15.00 OFF NOW

SAVE NOW

FOKUS



Di Balik Pertemuan Mendag - AS dan Ancaman Denda



AS Jatuhkan Sanksi Ekonomi ke Iran Hari Ini, Rouhani Melunak



Kontroversi Pidato Jokowi Soal Berani Berantem di Depan

